

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2014-2018***ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF REGIONAL FINANCIAL
PERFORMANCE OF BITUNG CITY GOVERNMENT BUDGET YEAR 2014-2018*

Oleh:

**Federicky Manimbaga¹
Jullie J. Sondakh²
Sherly Pinatik³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1tmanimbaga@gmail.com](mailto:tmanimbaga@gmail.com)[2julliesondakh@yahoo.com](mailto:julliesondakh@yahoo.com)[3sherlypinatik23@gmail.com](mailto:sherlypinatik23@gmail.com)

Abstrak : Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam mencapai hal tersebut perlu memerhatikan masalah efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi bagian dari asas penyelenggaraan negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis datanya bersifat deskriptif dengan menggunakan perhitungan konsep analisis efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan daerah untuk tingkat efektivitas pada Pemerintah Kota Bitung selama periode tahun anggaran 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efektif untuk tahun 2014 dan 2017, sedangkan cukup efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Sedangkan kinerja keuangan daerah untuk tingkat efisiensi pada Pemerintah Kota Bitung untuk tahun 2014-2018 pada umumnya sudah masuk kriteria efisien hanya pada tahun 2015 dan 2018 tergolong tidak efisien.

Kata Kunci: *efektivitas, efisiensi, kinerja keuangan daerah*

Abstract: *Implementation in the Local Government, especially for each Regional Device Organization (OPD) needs to pay attention to resource management (financial) properly, in this case the planning and the executing of budgeting should be contemplated thoroughly, so the effective and efficient accomplishment could be carried out as expected. The purpose of this research is to analyze the effectiveness and efficiency of budget execution on Agency for Regional Development of Tomohon, for the 2015-2017 period. The budget effectivity and efficiency level calculation was used as the analysis method for this research. The findings shows that the effectivity of 2015-2017's budgeting underwent increasing and decreasing percentage, where in 2015 it was 93,44% (effective); in 2016 it was 84,45 (fairly effective); and in 2017 it was 85,68% (fairly effective), so it can be said that the category suffered a declining from effective to be fairly effective. The institute is expected to make a well and careful planning in achieving the targets for budgeting so that in budget absorption in each program and activity that is listed for the budget implementation can be carried out and for the effectiveness of the budget realization can increase in the years following.*

Keywords: *effectivity, efficiency, regional financial performance*

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam urusan penyelenggaraan daerah harus menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran pemerintah daerah juga turut melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Begitu juga pun menyangkut masalah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Agar sistem penyelenggaraan pemerintah dari suatu daerah dapat mencapai kategori efektif dan efisien, maka dibuatlah suatu pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sendiri merupakan aspek penting yang menjadi kunci kemajuan suatu daerah jika dikelola secara cermat dan tepat. Dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 ayat (1) yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban dari setiap daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, restribusi atau sumber penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban daerah, didalam pengeluaran dana demi melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Keuangan daerah menjadi bagian dari keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu bentuk nyata rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengkaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang (anggaran), untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran (periode anggaran). Hal ini menunjukkan APBD digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam hal penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran yang menyangkut hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah.

Adanya otonomi daerah pada setiap daerah di Indonesia menyebabkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan dan sistem keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bitung, karena itu Pemerintah Kota Bitung sebagai pihak yang diserahi tugas untuk membantu urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum didalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugasnya dengan melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dan bisa dinilai apakah Pemerintah Kota Bitung berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pada penelitian ini peneliti ingin mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bitung dengan permasalahan yang timbul dimana pemerintah daerah maupun pemerintah pusat didalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah pasti mendapati kendala/masalah yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Pondaag yaitu berbagai permasalahan dan kesalahan amat sering ditemui dalam hal penyusunan, pengelolaan dan penyerapan anggaran. Permasalahan-permasalahan tersebut sering kali menjadi penghambat bagi satuan-satuan kerja perangkat daerah (Pelealu, 2019). Hal lain juga yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, mencatat mayoritas pemerintah daerah masih lebih banyak menggunakan anggarannya untuk menggaji pegawai ketimbang membelanjakannya untuk proyek pembangunan, sehingga menunjukkan kinerja yang tidak efisien (Kumolo, 2016).

Hal lain juga yang dilansir didalam (Tribun Bitung, 2019) adapun data yang sempat dihimpun dari bagian pembangunan Setda Kota Bitung untuk total belanja tahun anggaran (TA) 2019 Rp945.683.327.933,62 dan realisasi total Kota Bitung sebesar Rp616.267.002.507,00 atau sebanyak 65,17% dan target per 31 Oktober 2019 sebesar 80%. Selain itu dampak dari penyerapan rendah mengakibatkan perputaran atau roda ekonomi

di daerah tidak bergairah dan pembangunan di daerah akan terasa lambat. Sehingga pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung perlu dilakukan untuk mengetahui/mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Bitung didalam mengelola keuangan daerahnya yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis efektivitas kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018.
2. Menganalisis efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Mahmudi (2018:92) Grady mendefinisikan akuntansi dalam artikelnya *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises* yaitu akuntansi sebagai tubuh dari ilmu pengetahuan serta fungsi organisasi secara sistematis, autentik, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional entitas akuntansi dengan tujuan menyediakan informasi yang berarti dibutuhkan manajemen sebagai laporan dan pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diterimanya. Dalam perkembangan ilmu akuntansi ini salah satunya akuntansi pemerintahan, di mana dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah memerlukan informasi yang akurat dan tepat mengenai pengelolaan aset dan sumber daya keuangan sehingga mampu menunjang transparansi dan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaannya. Akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan ini memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik dengan memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Dapat ditarik kesimpulan akuntansi pemerintahan sendiri adalah prinsip dasar dari ilmu akuntansi yang aktivitasnya berhubungan dengan domain publik atau lembaga negara (Mardiasmo, 2018:2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pengertian lain dari APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Siregar, 2017:31). APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran ini berisikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan pada suatu entitas pelaporan. Siregar (2017:117) mengemukakan laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode.

Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Konsep Efektivitas

Mardiasmo (2018:166) mengemukakan pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas itu merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dinilainya efektif suatu organisasi ataupun program yang dilakukan apabila *output* itu sendiri mampu memenuhi tujuan dan dapat dikelola secara baik dan tepat.

Mahmudi (2013:86) menjelaskan bahwa, efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dengan

output. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Tingkat efektivitas di dalam pengukuran efektivitas kinerja keuangan sendiri diukur melalui perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yaitu:

Berikut ini adalah pengukuran efisiensi anggaran belanja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Realisasi Pendapatan

Output = Anggaran Pendapatan

Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Konsep Efisiensi

Mardiasmo (2018:165) pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 mencantumkan pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya yang dalam pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian keluaran (*output*) program atau capaian keluaran (*output*) kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian keluaran (*output*) program atau capaian keluaran (*output*) kegiatan.

Mahmudi (2013:85) menyebutkan efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain output per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Tingkat efisiensi dapat dilihat dengan mengukur perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output = Realisasi Belanja

Input = Realisasi Pendapatan

Penelitian Terdahulu

Rahayu (2016) dengan judul Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Dinas PU Bina Marga Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012-2013 mengalami Penurunan kinerja yaitu sebesar (61,02%), sedangkan tahun 2013-2014 mengalami kenaikan kinerja yaitu 116,54% meskipun demikian Pendapatan Asli Daerah sudah efektif.

Oktavia (2017) dengan judul *The Impact of An Implementation Performance Based Budgeting (PBB) On an Efficiency of Financial Performance on Local Governance in Indonesia*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis *data envelopment* (DEA). Hasil penelitian menunjukkan pencapaian efisiensi kinerja keuangan pada pemerintah provinsi didalam penelitian ini berdasarkan lokal kemandirian pemerintah dalam menjalankan aktivitas operasional pemerintahan.

Salamah (2018) dengan judul Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yaitu menunjukkan kriteria dalam strategi penyerapan APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pertama faktor regulasi, kedua kriteria faktor perencanaan anggaran, dan ketiga kriteria faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan alternatif prioritas program diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, untuk semua data dan dokumen yang telah didapat diolah kemudian dijelaskan secara deskriptif melalui hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggambarkan hasil pengamatan atau turun langsung ke lapangan (observasi) dan wawancara mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung tahun anggaran 2014 hingga tahun 2018.

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung dengan mengambil data pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung. Waktu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 2020 sampai selesai.

Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu untuk data kualitatif berupa hasil wawancara, gambaran umum, tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi pemerintahan Kota Bitung, sedangkan untuk data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bitung untuk tahun anggaran (TA) 2014-2018.

Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan data primer. Untuk data primer sendiri diperoleh secara langsung pada objek yang diteliti lewat catatan, dokumen laporan realisasi anggaran, dan wawancara yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan dan bagian penting dalam penelitian ini, karena berdampak pada kelancaran proses dan hasil penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memperoleh dan mengumpulkan data melalui:

1. Observasi dan dokumentasi, dalam memperoleh data dilakukan pemantauan langsung pada objek yang diteliti terkait masalah dan meminta sejumlah dokumen dan catatan-catatan yang ada terkait kinerja keuangan daerah, serta data atau dokumen berupa struktur organisasi Pemerintah Kota Bitung, visi dan misi, fungsi dan tugas, dan laporan realisasi anggaran.
2. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan kepala bidang anggaran BKAD Kota Bitung Bpk. Johan R. Pratas lewat beberapa pertanyaan yaitu:

Metode Analisis Data

Metode analisis adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung lewat konsep efektivitas dan efisiensi.

1. Analisis Dengan Konsep Efektivitas

Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengukur efektifnya kinerja keuangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bitung. Pengukuran diukur melalui perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Seperti yang dirumuskan dibawah ini (Mahmudi, 2013:86):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Realisasi Pendapatan

Output = Anggaran Pendapatan

Dalam pengukuran analisis efektivitas sendiri membutuhkan standar yang dibuat untuk acuan atau dasar menentukan apakah dapat dikategorikan secara efektif. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2013:111) pada tabel 1.

Tabel 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
≥	Efektif
85-99	Cukup Efektif
65-84	Kurang Efektif
≤65	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2013

2. Analisis Dengan Konsep Efisiensi

Analisis efisiensi ini digunakan dalam menentukan, apakah suatu capaian telah dikatakan efisien melalui pencapaian berupa output yang besar dan input yang sedikit. Pengukuran melalui perbandingan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan dengan rumus Mahmudi (2013:85), yaitu:

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} \times 100\%$$

Keterangan:

Output = Realisasi Belanja

Input = Realisasi Pendapatan

Dalam menentukan rasio perbandingan dari rumus tersebut diperlukan sebuah standar untuk masuk sebagai kriteria efisien. Dikatakan efisien jika memenuhi kriteria yang diungkapkan oleh Mahmudi (2013:111) pada tabel 2.

Tabel 2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
<90	Sangat Efektif
90-99	Efektif
100	Cukup Efektif
>100	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2013

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Wilayah Administrasi

Kota Bitung terletak pada posisi geografis 1°23'23" - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT. Batas wilayah Kota Bitung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara) dan Laut Maluku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Laut Maluku.
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara).
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Laut Maluku.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bitung terletak di daratan pulau Sulawesi dan sebagian adalah daerah kepulauan yaitu Pulau Lembeh. Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan, 6 kecamatan terletak di pulau Sulawesi yaitu Kecamatan Madidir, Matuari, Girian, Aertembaga, Maesa dan Ranowulu dan 2 kecamatan terletak di Pulau Lembeh yaitu Lembeh Selatan dan Lembeh Utara. Kecamatan- kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Madidir yang memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Matuari yang memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Girian yang memiliki 7 kelurahan, Kecamatan Lembeh Selatan memiliki 7 kelurahan, Kecamatan Lembeh

Utara yang memiliki 10 kelurahan, Kecamatan Aertembaga yang memiliki 10 kelurahan, Kecamatan Maesa yang memiliki 8 kelurahan, dan Kecamatan Ranowulu yang memiliki 11 kelurahan.

Kondisi Fisik

Dilihat dari aspek topografis, keadaan tanah sebagian besar daratan Kota Bitung 45,06 % berbukit dan 32,73 % bergunung. Hanya 4,18 % merupakan dataran landai serta sisanya 18,03 % berombak. Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aertembaga, sampai dengan Tanjung Merah di bagian Barat merupakan dataran yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman. Pada bagian utara, keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukit-bukit. Bagian utama dari lahan tersebut merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman margasatwa dan cagar alam. Di bagian selatan terdapat sebuah pulau yakni Pulau Lembeh. Keadaan tanahnya secara umum kasar dan ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura serta palawija. Pulau Lembeh memiliki pesisir pantai yang indah dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari. Kemiringan lereng di Kota Bitung sebagian besar didominasi oleh kelerengan antara 25 – 40 %. Hal ini terlihat dari luas wilayah kelerengan 25 – 40 % yang mempunyai wilayah terluas yaitu sebesar 11.759 Ha atau sekitar 37,52 % dari total luas Kota Bitung saat ini daerah pesisir pulau Lembeh ini pada titik-titik tertentu dan daerah yang dianggap rawan di Kota Bitung merupakan daerah rawan gelombang pasang/abrasi.

Hasil Penelitian

Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Dengan Konsep Efektivitas

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2014	729.466.744.841,00	745.132.180.691,00
2015	725.429.140.000,00	724.062.475.263,30
2016	894.060.802.521,00	850.221.255.724,63
2017	814.006.889.763,00	869.634.357.168,04
2018	983.187.829.543,00	967.751.473.528,70

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung, 2014-2018

Melalui tabel realisasi anggaran belanja diatas dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2014, anggaran pendapatan berjumlah Rp729.466.744.841,00 dengan realisasinya Rp745.132.180.691,00, sehingga perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan tahun 2014 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2014} = \frac{729.466.744.841,00}{745.132.180.691,00} \times 100\% = 102,14\%$$

- b. Pada tahun 2015, anggaran pendapatan berjumlah Rp725.429.140.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp724.062.475.263,30, sehingga perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan tahun 2015 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2015} = \frac{725.429.140.000,00}{724.062.475.263,30} \times 100\% = 99,81\%$$

- c. Pada tahun 2016, anggaran pendapatan berjumlah Rp894.060.802.521,00 dengan realisasinya sebesar Rp850.221.255.724,63, sehingga perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan tahun 2016 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2016} = \frac{894.060.802.521,00}{850.221.255.724,63} \times 100\% = 95,09\%$$

- d. Pada tahun 2017, Target anggaran belanja berjumlah Rp814.006.889.763,00 dengan realisasinya sebesar Rp869.634.357.168,04, sehingga perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2017} = \frac{814.006.889.763,00}{869.634.357.168,04} \times 100\% = 106,83\%$$

- e. Pada tahun 2018, Target anggaran belanja berjumlah Rp983.187.829.543,00 dengan realisasinya sebesar Rp967.751.473.528,70, sehingga perhitungan tingkat efektivitas kinerja keuangan tahun 2018 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2018} = \frac{983.187.829.543,00}{967.751.473.528,70} \times 100\% = 98,42\%$$

Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Dengan Konsep Efisiensi

Tabel 4. Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bitung Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)
2014	716.727.700.397,00	745.132.180.691,00
2015	755.459.315.538,00	724.062.475.263,30
2016	799.459.099.837,00	850.221.255.724,63
2017	818.264.125.391,00	869.634.357.168,04
2018	985.702.016.832,85	967.751.473.528,70

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung, 2014-2018

Melalui tabel diatas dapat dilakukan perhitungan efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2014, realisasi anggaran belanja sejumlah Rp716.727.700.397,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp745.132.180.691,00, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2014} = \frac{716.727.700.397,00}{745.132.180.691,00} \times 100\% = 96,18\%$$

- b. Pada Tahun 2015, realisasi anggaran belanja sejumlah Rp755.459.315.538,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp724.062.475.263,30, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2015} = \frac{755.459.315.538,00}{724.062.475.263,30} \times 100\% = 104,33\%$$

- c. Pada Tahun 2016, realisasi anggaran belanja sejumlah Rp799.459.099.837,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp850.221.255.724,63, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2016} = \frac{799.459.099.837,00}{850.221.255.724,63} \times 100\% = 94,02\%$$

- d. Pada Tahun 2017, realisasi anggaran belanja sejumlah Rp818.264.125.391,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp869.634.357.168,04 maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2017} = \frac{818.264.125.391,00}{869.634.357.168,04} \times 100\% = 94,09\%$$

- e. Pada Tahun 2018, realisasi anggaran belanja sejumlah Rp985.702.016.832,85 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp967.751.473.528,70, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2018} = \frac{985.702.016.832,85}{967.751.473.528,70} \times 100\% = 101,85\%$$

Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Tabel 5. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015-2017

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	729.466.744.841	745.132.180.691	102,1	Efektif
2015	725.429.140.000	724.062.475.263	99,8	Cukup Efektif
2016	894.060.802.521	850.221.255.724	95	Cukup Efektif
2017	814.006.889.763	869.634.357.168	106,8	Efektif
2018	983.187.829.543	967.751.473.528	98,4	Cukup Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung Tahun 2014-2018, Data Olahan 2020

Dari tabel 5. dapat dilihat total pendapatan Pemerintah Kota Bitung tahun 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efektif untuk tahun 2014 dan 2017, sedangkan cukup efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Cukup efektif, dikarenakan adanya realisasi yang sedikit dibandingkan dengan anggaran pendapatan.

Pada tahun 2016 besaran anggaran pendapatan Rp729.466.744.841,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp745.132.180.691,00 atau 99,8% (cukup efektif). Ditahun ini terdapat tiga kelompok pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan empat kategori pendapatan dimana dua kategori menunjukkan kriteria efektif (Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan) dengan persentase lebih dari sama dengan 100% dan kriteria cukup efektif (Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) atau dibawah 100%. Sedangkan untuk kelompok Pendapatan Transfer menunjukkan kriteria efektif dan kelompok Pendapatan Lain yang Sah masih tergolong cukup efektif.

Tahun 2018 menunjukkan anggaran pendapatan berjumlah Rp983.187.829.543,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp967.751.473.528,70 dan hasil perbandingan yaitu 98,4% (cukup efektif). Ditahun ini juga terdapat tiga kelompok pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dari empat kategori hanya tiga yang perbandingannya masuk pada kriteria efektif (Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) atau diatas 100% dan sisanya yaitu Pendapatan Retribusi Daerah dengan hasil 67,54% atau kurang efektif. Sedangkan untuk kelompok Pendapatan Transfer terbagi atas dua kriteria yaitu efektif (Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya) atau diatas 100% dan cukup efektif (Transfer Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan) atau dibawah 100%. Sehingga permasalahan penurunan persentase pada setiap kelompok pendapatan akan berdampak terhadap efektivitas total pendapatan untuk tahun anggaran.

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Tabel 6. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2014	716.727.700.397	745.132.180.691	96,18	Efisien
2015	755.459.315.538	724.062.475.263	104,33	Tidak Efisien
2016	799.459.099.837	850.221.255.724	94,02	Efisien
2017	818.264.125.391	869.634.357.168	94,09	Efisien
2018	985.702.016.832	967.751.473.528	101,85	Tidak Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung Tahun 2014-2018, Data Olahan 2020

Melalui tabel 6. dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja Pemerintah Kota Bitung dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, dimana persentase realisasi belanja untuk tahun 2014 yaitu 96,18%, kemudian untuk tahun 2015 menjadi 104,33% atau naik sebesar 8,15%, selanjutnya tahun 2016 menjadi 94,02% atau turun sebanyak 10,31%, sedangkan untuk tahun 2017 menjadi 94,09% kembali naik sebanyak 0,07% dan terakhir pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 101,85% atau sebanyak 7,76%.

Terkait dengan naik dan turunnya persentase tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung untuk tahun 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efisien dan tidak efisien, dikarenakan jumlah realisasi pendapatan yang jauh lebih rendah dibanding realisasi belanja pada tahun anggaran. Seperti halnya untuk tahun 2015 dimana realisasi pendapatan untuk tahun ini sebesar Rp724.062.475.263,30 dan realisasi belanja sebanyak Rp755.459.315.538,00, sehingga dilihat realisasi pendapatan jauh lebih rendah dibanding realisasi belanja yang mengakibatkan perbandingan antara kedua kelompok ini menjadi tidak efisien, begitu

juga dengan tahun 2018 realisasi belanja lebih banyak dari realisasi pendapatan dan dapat dibilang berpengaruh pada total tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah tahun tersebut, namun untuk tahun 2014, 2016, 2017 dapat dikatakan telah memenuhi tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah dengan kriteria efisien karena masih dalam kategori 90%.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kinerja keuangan daerah untuk tingkat efektivitas pada Pemerintah Kota Bitung selama periode tahun anggaran 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efektif untuk tahun 2014 dan 2017, sedangkan cukup efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Cukup efektif dikarenakan adanya realisasi yang sedikit dibandingkan dengan anggaran pendapatan, salah satunya pada tahun 2015 untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah terdapat empat kategori yang ada didalamnya tapi hanya tiga kategori saja yang mencapai kriteria cukup efektif atau di bawah 100% dan satunya lagi yaitu Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah tergolong kurang efektif dan pada kelompok Pendapatan Transfer perbandingan realisasi dan anggarannya masuk pada kriteria cukup efektif (di bawah 100%). Sehingga permasalahan penurunan persentase pada setiap kelompok pendapatan akan berdampak terhadap efektivitas total pendapatan untuk tahun anggaran.
2. Kinerja keuangan daerah untuk tingkat efisiensi pada Pemerintah Kota Bitung untuk tahun anggaran 2014-2018 pada umumnya sudah masuk kriteria efisien hanya pada tahun 2015 dan 2018 tergolong tidak efisien, dikarenakan untuk tahun 2015 dimana realisasi pendapatan untuk tahun ini sebesar Rp724.062.475.263,30 dan realisasi belanja sebanyak Rp755.459.315.538,00 dan dapat dikatakan realisasi pendapatan jauh lebih rendah dibanding realisasi belanja yang mengakibatkan perbandingan antara kedua kelompok ini menjadi tidak efisien, begitu juga dengan tahun 2018 realisasi belanja lebih banyak dari realisasi pendapatan dan dapat dibilang berpengaruh pada total tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah tahun tersebut, namun untuk tahun 2014, 2016, 2017 dapat dikatakan telah memenuhi tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah dengan kriteria efisien karena masih dalam kategori 90%.

Saran

1. Untuk hal kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung agar dapat dipertahankan tingkat efektivitas dan efisiensinya dalam periode anggaran selanjutnya, dengan melakukan penyusunan anggaran yang lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung ditahun-tahun selanjutnya.
2. Terkait masalah penurunan dan kenaikan (fluktuasi) tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bitung perlu diperhatikan dengan mengadakan evaluasi atau kontrol kembali dari Pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan yang akan dilaksanakan, supaya tepat sasaran realisasinya dan memungkinkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung ditahun-tahun selanjutnya bisa terus konsisten dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode analisis sejenis atau analisis yang lebih baik (akurat) yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2019). *'Enggan' Beber Realisasi Anggaran*. <https://manado.tribunnews.com/2019/12/16/badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerahenggan-beber-realisasi-anggaran>. Diakses 31 Januari 2020 (19:10).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018*.

Kumolo, T. (2016). *Belanja pegawai 294 kabupaten/kota masih tinggi*. <http://nasional.kontan.co.id/news/belanja-pegawai-294-kabupatenkota-masih-tinggi>. Diakses 31 Januari 2020 (11:30).

Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta.

Oktavia, R. (2017). The Impact of An Implementation Performance Based Budgeting (PBB) On an Efficiency of Financial Performance on Local Governance In Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research* 6(8): 2277-8616. <https://www.google.co.id/url?q=https://www.ijstr.org/final-print/aug2017/The-Impact-Of-An-Implementation-Performance-Based-Budgeting-pbb-On-An-Efficiency-Of>.

Olivia Pondaag. (2019). *Konsep Klinik Anggaran*. <https://beritamanado.com/olivia-pondaag-gagas-konsep-klinik-anggaran/>. Diakses 31 Januari 2020 (10:00).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. 29 Desember 2017. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Rahayu, R. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 1(1): 34-45. http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_makro_manajemen/article/view/244.

Salamah, S. (2018). Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal* 7(1): 987-997. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/21927>.

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 9 Maret 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.